

**DESENTRALISASI FISKAL, POLITIK DINASTI,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KINERJA,
AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN: BUKTI
EMPIRIS DI INDONESIA**



Ilham Maulana Saud¹ dan Gisti Fairus Trisha²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

¹ilhammaulanasaud@gmail.com, ²gistifairuz@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Fiscal Decentralization, Dynasty
Politics, Number of Violations in
Internal Control Systems,
Performance, Accountability of
Regional Government Financial
Reporting*

This study aims to analyze the influence of fiscal decentralization, dynastic political, and total violation of internal control system on accountability of financial reporting of district/city governments moderated by performance variable at District/City Government in Indonesia in 2013-2015. Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression with MRA (Moderated Regression Analysis). Based on the results of the study it can be concluded that partially the dependent variable on the central government, dynastic politics, and the number of violations of the internal control system has a significant negative effect on the accountability of local government financial reporting, while the variables of regional independence and financial effectiveness do not affect the financial reporting accountability of local governments. Furthermore, the performance variable is able to moderate the effect of dependence on the central government on the accountability of local government financial reporting, but is unable to moderate the influence of regional independence and dynastic politics on the accountability of local government financial reporting.

1. PENDAHULUAN

Sistem desentralisasi di Indonesia mulai diberlakukan pada tahun 2001 setelah dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang telah disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Desentralisasi merupakan suatu proses pelimpahan kekuasaan politik, fiskal (keuangan), serta pelimpahan pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah (Moisiu, 2013). Dalam era desentralisasi saat ini, akuntabilitas dalam segi kinerja maupun penyajian pelaporan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Mardiasmo(2002) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan daerah merupakan salah satu elemen dari manajemen keuangan daerah yang dibutuhkan dalam rangka mengontrol kebijakan keuangan daerah.

Akuntabilitas diyakini mampu memperbaiki kondisi pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengurangi tingkat korupsi sehingga tercapai sistem pemerintahan yang demokratis (Erryana dan Setyawan, 2016). Melalui pemerintahan yang akuntabel, pemerintah akan memperoleh dukungan dari publik. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan cerminan keseriusan serta komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Melalui keseriusan serta komitmen, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atas segala sesuatu yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan pemerintah melalui program yang memiliki orientasi publik (Anggraini dan Riharjo, 2017).

Berdasarkan laporan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2014 menunjukkan bahwa opini audit dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013 masih didominasi oleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan persentase sebesar 60%, dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang mempunyai persentase lebih rendah yaitu sebesar 34%, dan sisanya adalah opini Tidak Wajar (TW) sebesar 2% dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) sebesar 4%. Hal serupa juga terjadi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013 yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Badan Lainnya telah didominasi oleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan di kalangan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah masih tergolong lemah jika dibandingkan dengan Kementerian Negara/Lembaga dan badan lainnya.

Secara umum, desentralisasi fiskal mampu mendorong pemerintah daerah mempunyai akuntabilitas keuangan yang tinggi jika dilihat dari aspek kemandirian daerah serta ketergantungan pada pemerintah pusat (Fontanella dan Rossieta, 2014). Kemandirian daerah merupakan suatu kondisi di mana daerah mampu secara mandiri membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta melayani masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajaknya serta retribusi yang menjadi sumber keuangan (Halim dan Kusufi, 2012). Mudhofar dan Tahar (2016), Fontanella dan Rossieta (2014), Erryana dan Setyawan (2016) menyatakan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemandirian daerah yang tinggi, daerah dapat membiayai belanja secara mandiri, sehingga mampu lebih mudah dalam mempertanggungjawabkan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya. Namun, penelitian yang dilakukan Purbasari dan Bawono (2017) diperoleh hasil bahwa desentralisasi fiskal yang diukur dengan tingkat kemandirian daerah tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

Halim (2001) menjelaskan ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah adanya kemampuan keuangan daerah serta rendahnya ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Ketergantungan pada pemerintah pusat yang rendah bertujuan agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi sumber keuangan terbesar, sehingga peranan daerah menjadi lebih besar. Seiring dengan terjadinya peningkatan PAD, kemandirian pemerintah daerah diharapkan semakin meningkat ditunjukkan dengan meningkatnya kontribusi PAD dalam mendanai belanja daerah, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat akan semakin kecil. Namun, hasil-hasil penelitian terdahulu belum memberikan bukti empiris pengaruh ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (Fontanella dan Rossieta, 2014; Erryana dan Setyawan, 2016; Mudhofar dan Tahar, 2016).

Efektivitas keuangan didefinisikan sebagai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber pendapatan serta memaksimalkan potensi pendapatan yang dibutuhkan dalam untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan (Mudhofar dan Tahar, 2016). Dalam penelitian ini, efektivitas keuangan yang dimaksud adalah sejauh mana kemampuan pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang telah

dianggarkan sebelumnya. Mudhofar dan Tahar (2016) menunjukkan efektivitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Erryana dan Setyawan (2016) menunjukkan pengaruh negatif efektivitas keuangan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.

Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi memunculkan risiko adanya kontrol penuh oleh elit daerah. Dalam beberapa kajian ekonomi politik, dinyatakan bahwa para elit memiliki kecenderungan untuk mempertahankan serta memperoleh kembali kekuasaannya dalam jangka waktu yang lama melalui salah satunya adalah politik dinasti (Querrubin, 2010). Banyak daerah di Indonesia, para elit daerah membangun dinasti politik melalui pemilihan umum kepala daerah (Halim, 2014). Para pelaku politik dinasti akan menduduki jabatan publik yang sama yang diperoleh dari anggota keluarga mereka yang menduduki jabatan sebelumnya (Asako *et al.*, 2012). Hasil penelitian Nuritomo dan Rossieta (2014), Anggraini dan Riharjo (2017), menemukan politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, pemerintah memerlukan suatu sistem pengendalian internal yang telah diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008. Melalui penerapan mekanisme pengendalian internal yang baik akan memberikan jaminan secara keseluruhan terhadap kualitas kinerja pemerintah untuk melindungi aset negara dan menjamin kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (Darmawati, 2017). Purbasari dan Bawono (2017), Rasmini dan Masdiantini (2018) memperoleh hasil bahwa jumlah temuan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan kinerja sebagai variabel moderasi dalam rangka melihat apakah kinerja mampu memperkuat atau memperlemah hubungan kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, dan politik dinasti terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ketika pemerintahan memiliki kinerja yang baik, maka kemungkinan besar daerah memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi. Oleh karena itu, ketika kemandirian daerah tinggi, ketergantungan pada pemerintah pusat rendah, dan melakukan politik dinasti maka akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah akan lebih baik jika kinerja pemerintahan daerah baik. Hal ini sejalan dengan konsep *signaling theory* bahwa entitas akan menyampaikan akuntabilitas yang lebih baik ketika entitas tersebut memiliki kinerja baik (Williams, 2001). Hasil penelitian Nuritomo dan Rossieta (2014) menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

mampu memperlemah pengaruh negatif dari ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan. Mudhofar dan Tahar (2016) juga menemukan bahwa kinerja sebagai pemoderasi memiliki pengaruh pada hubungan antara tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Motivasi penelitian ini dilakukan atas dasar fenomena yang terjadi pada tahun 2013-2015. Pertama, berdasarkan laporan opini audit BPK tahun 2013 menunjukkan akuntabilitas laporan keuangan di kalangan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih tergolong lemah jika dibandingkan dengan Kementerian Negara/Lembaga dan badan lainnya. Kedua, tahun 2013 isu mengenai politik dinasti ramai diperbincangkan setelah adanya penangkapan terhadap Tubagus Chaeri Wardhana yang merupakan adik ipar dari Gubernur Banten (Ratu Atut Chosiyah) dan suami Walikota Tangerang Selatan (Airin Rachmi Diany) atas dugaan suap ke Mahkamah Konstitusi terkait kasus pilkada Lebak, Banten. Dari penangkapan tersebut, terungkaplah jaringan politik dinasti dari keluarga Ratu Atut Chosiyah, sehingga pada saat itu isu mengenai politik dinasti sangat ramai diperbincangkan.

Ketiga, berdasarkan data jumlah kelemahan SPI yang terdapat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI, pada tahun 2013-2014 terjadi tren kenaikan jumlah kelemahan SPI yang ditemukan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dimana pada tahun 2013 terjadi 6.943 kasus kelemahan SPI oleh pemerintah daerah, dan pada 2014 mengalami kenaikan menjadi 7.642 kasus kelemahan SPI. Pada tahun 2015, kasus kelemahan SPI oleh pemerintah daerah mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 7.093 kasus kelemahan SPI. Keempat, masih inkonsistensinya hasil penelitian terdahulu.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah berupa masukan serta pertimbangan dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga mampu tercipta pemerintahan yang terbebas dari korupsi serta adanya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pentingnya akuntabilitas pelaporan keuangan daerah, sehingga masyarakat diharapkan selalu melakukan pengawalan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* atau biasa disebut teori pengabdian beranggapan bahwa pada hakikatnya manusia dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi serta memiliki kejujuran. Aspek psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dalam teori ini adalah para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principle*, selain itu *steward* cenderung tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya tersebut (Riyadi dan Yulianto, 2014).

Penerapan teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah selaku *steward* diharapkan mampu bertindak sebaik mungkin terhadap kepentingan publik. Salah satunya adalah melaksanakan akuntabilitas publik. Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik, pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam memberikan informasi yang akuntabel sebagai bentuk upaya memenuhi hak-hak publik yang meliputi hak untuk diberi tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Teori Pilihan Publik

Dalam teori pilihan publik, asumsi dan teknik yang digunakan untuk memberikan gambaran, analisis, dan memprediksi perilaku dalam proses demokrasi sektor publik berasal dari bidang ekonomi (Schneider dan Damanpour, 2002). Menurut perspektif teori pilihan publik, birokrat dalam hal ini adalah aparat pemerintahan yang peran utamanya adalah menjalankan peraturan perundang-undangan sekaligus pembuat kebijakan, justru menyalahgunakan pengetahuan mereka untuk memberikan pengaruh serta batasan terhadap pilihan masyarakat selaku legislator. Dengan kata lain, aparat pemerintahan akan menggunakan wewenang dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kepentingan pribadi, termasuk dalam proses penentuan kebijakan penganggaran (Schneider dan Damanpour, 2002).

Teori pilihan publik menjelaskan bahwa pejabat serta birokrat pemerintah yang mengaku mengutamakan kepentingan umum dalam proses pemungutan suara, justru memanfaatkan sektor publik untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Untuk mencapai kepentingan pribadi mereka, birokrat akan senantiasa menyusun program dengan

penganggaran yang tidak sesuai dan berupaya untuk terus meningkatkan kekuatan serta pengaruh mereka. Keterkaitan antara teori pilihan publik (*public choice theory*) dengan penelitian ini yaitu teori ini digunakan sebagai dasar pemikiran dalam menjelaskan bagaimana fenomena politik dinasti dapat terjadi. Teori pilihan publik mampu memberikan gambaran terkait motivasi para pelaku politik dinasti yang berusaha mempertahankan kekuasaannya dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi mereka.

Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Desentralisasi fiskal dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi karena desentralisasi fiskal akan menciptakan kesempatan bagi daerah untuk memperoleh kemandirian dalam hal pendanaan. Kemandirian pendanaan akan diterima oleh investor dan kreditur selaku penyedia dana apabila pemerintah daerah memiliki akuntabilitas yang baik. Erryana dan Setyawan (2016) menyatakan bahwa daerah yang memiliki kemandirian daerah tinggi laporan keuangannya cenderung bebas dari salah saji.

Berkaitan dengan belanja daerah, Mudhofar dan Tahar (2016) menyatakan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Melalui kemandirian daerah yang tinggi, pemerintah daerah mampu membiayai belanja daerahnya secara mandiri sehingga daerah dapat memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya dengan lebih baik. Fontanella dan Rossietta (2014), Erryana dan Setyawan (2016) memperoleh hasil bahwa tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kemandirian yang tinggi maka penerimaan asli daerah akan meningkat, dengan meningkatnya penerimaan asli daerah menunjukkan penerimaan PAD dikelola dengan lebih baik oleh pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara akuntabel. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan paling penting dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah adalah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, utamanya dalam mengatur pembangunan daerahnya sendiri. Salah satu ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah daerah mampu melakukan pembiayaan sendiri dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Nuritomo dan Rossieta (2014) menyatakan bahwa ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat akan menurunkan upaya pemerintah daerah dalam memperoleh pendanaan sendiri. Artinya, dana yang besar dari pemerintah pusat memiliki korelasi negatif terhadap peningkatan PAD. Ketika proporsi pendapatan daerah yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat semakin kecil, dan proporsi PAD suatu daerah semakin besar, kondisi tersebut akan berdampak pada semakin lancarnya mobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah (Ariansyah *et al*, 2014). Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintah daerah yang lancar akan mendukung terciptanya akuntabilitas yang baik (Mudhofar dan Tahar, 2016). Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis kedua adalah:

H₂ : Ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Efektivitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam teori *stewardship* dijelaskan hubungan antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalnya pencapaian pada kelompok *principal* dan manajemen. Teori ini sejalan dengan prinsip efektivitas keuangan dalam lingkup pelaksanaan pemerintahan daerah. Efektivitas keuangan menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber pendapatan dan memaksimalkan potensi pendapatan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (Mudhofar dan Tahar, 2016).

Suatu entitas memiliki kecenderungan untuk menyampaikan pelaporan kinerjanya ketika entitas tersebut memperoleh pencapaian kinerja yang bagus (Williams, 2001). Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan legitimasi politik agar suatu entitas dipandang baik (Sofyani dan Akbar, 2013). Salah satu bentuk penyampaian kinerja dalam

lingkup pemerintah daerah adalah penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan dibutuhkan untuk bahan evaluasi efektivitas, efisiensi, serta menilai ketaatan terhadap regulasi. Terpenuhinya realisasi anggaran menjadikan kepercayaan diri bagi pemerintah untuk mengungkapkan laporan tersebut secara transparan dan akuntabel (Erryana dan Setyawan, 2016). Sehingga, ketika efektivitas keuangan pemerintah daerah tercapai, hal tersebut akan memotivasi pemerintah daerah untuk mengungkapkan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Erryana dan Setyawan (2016) menemukan pengaruh negatif efektivitas daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis ketiga adalah:

H₃ : Efektivitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Politik Dinasti terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teori pilihan publik (*publicchoicetheory*) menyatakan bahwa birokrat (aparatur pemerintahan) yang terpilih dalam proses pemungutan suara, seringkali berupaya untuk memaksimalkan kepentingan pribadi dengan dalih kepentingan umum dengan memanfaatkan organisasi sektor publik (Schneider dan Damanpour, 2002). Asoka *et al.*, (2010) menyatakan bahwa politik dinasti akan memunculkan potensi terhambatnya proses pembangunan ekonomi serta memperlemah daya saing dalam pemilihan umum. Daerah-daerah yang dipimpin oleh politisi dinasti dinilai kurang efektif dalam proses pembangunan ekonomi, walaupun daerah tersebut memperoleh alokasi anggaran yang besar dari pemerintah pusat. Adanya praktik politik dinasti menyebabkan berkurangnya calon alternatif bagi masyarakat, karena politisi dinasti memiliki peluang yang lebih besar untuk menang dalam pemilihan umum (Querrubin, 2010). Karena pada prinsipnya, suksesi kepemimpinan dalam praktik politik dinasti tidak berdasarkan pada profesionalitas dan kapabilitas melainkan bertumpu pada hubungan darah (Prianto, 2016). Hubungan kekuasaan kekerabatan akan membentuk oligarki politik dan menimbulkan rezim absolut, sehingga sulitnya pengawasan terhadap penguasa di daerah. Minimnya pengawasan dan profesionalitas yang tidak memadai dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Adanya penyalahgunaan wewenang dan korupsi di daerah mengakibatkan rendahnya akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pada akhirnya, BPK tidak akan memberikan opini audit yang baik ketika menemukan adanya kejanggalaan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Nuritomo dan Rossieta (2014), Anggraini dan Riharjo (2017) mengungkapkan bahwa politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis keempat adalah:

H₄ : Politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Jumlah Pelanggaran Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan utama adanya sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan manajemen administrasi dengan memberikan jaminan yang wajar bahwa informasi keuangan yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan, organisasi sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan kontrak, aset dijaga terhadap kerugian dan pencurian, sumber daya yang digunakan secara ekonomis dan secara efisien, dan tujuan serta sasaran untuk operasi atau program yang ditetapkan dapat dipenuhi. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, sistem pengendalian internal yang layak diperlukan sebagai salah satu metode dalam mencegah terjadinya penipuan dan pelaporan keuangan yang tidak akurat (Elmaleh, 2006).

Jika sistem pengendalian internal ditingkatkan, penemuan kelemahan/pelanggaran sistem pengendalian internal akan lebih rendah sehingga hal tersebut akan menghasilkan pendapat yang lebih baik mengenai laporan keuangan pemerintah daerah (Munawar *et al*, 2016). Opini BPK yang baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang baik pula. Purbasari dan Bawono (2017), Rasmini dan Masdiantini, (2018) memperoleh hasil bahwa kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah dalam Memoderasi Hubungan Kemandirian Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara umum, desentralisasi fiskal dipercaya dapat berpengaruh terhadap tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan daerah, khususnya jika dilihat dari aspek kemandirian daerah (Fontanella dan Rossieta, 2014). Kemandirian daerah yang tinggi dan didukung dengan implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Adi, 2016). Kualitas pelayanan publik yang baik merupakan cerminan dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang baik.

Kinerja dinilai dapat memperkuat keinginan untuk menunjukkan akuntabilitas yang lebih baik ketika suatu pemerintah daerah mendapatkan kemandirian daerah dari pemerintah pusat (Mudhofar dan Tahar, 2016). Ketika suatu pemerintah daerah mendapatkan kemandirian daerahnya, pemerintah daerah cenderung akan berupaya semaksimal mungkin dalam rangka meningkatkan penerimaan asli daerahnya melalui kinerja yang baik. Selanjutnya, kemandirian daerah yang tinggi akan meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah daerah akan lebih mudah dalam mempertanggungjawabkan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆ : Kinerja memperkuat hubungan kemandirian daerah dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah dalam Memoderasi Hubungan Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya menjadi salah satu ciri utama untuk melihat apakah daerah tersebut mampu melaksanakan otonominya. Kondisi ini merupakan gambaran dari tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Ketika dana yang ditransfer dari pemerintah pusat semakin kecil, atau PAD yang diperoleh daerah semakin besar, akan berdampak pada semakin lancarnya

mobilisasi dana dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah (Ariansyah *et al.*, 2014). Menurut Adi (2016), tingginya kemandirian daerah serta rendahnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan didukung dengan implementasi prinsip tata kelola yang baik maka akan meningkatkan kualitas layanan publik.

Dalam pelaksanaannya, penilaian kinerja pemerintah berdasarkan aspek finansial dan non finansial, seperti masalah kepegawaian yang bisa dihubungkan dengan prestasi kinerja dan kualitas pelayanan publik (Manurung, 2012). Semakin baik kinerja pemerintah daerah, semakin besar kemungkinan daerah tersebut mendapatkan nilai akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit yang baik (Fontanella dan Rossieta, 2014). Pelaporan kinerja melalui laporan keuangan merupakan salah satu cara terwujudnya akuntabilitas (Mahmudi, 2007).

Fontanella dan Rossieta, (2014), Mudhofar dan Tahar (2016) memperoleh hasil bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah mampu memperlemah pengaruh negatif tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₇ : Kinerja memperlemah hubungan ketergantungan pada pemerintah pusat dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah dalam Memoderasi Hubungan Politik Dinasti terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adanya praktik politik dinasti menyebabkan berkurangnya alternatif calon bagi masyarakat, karena peluang menangnya politisi dinasti dalam pemilihan umum lebih besar (Querrubin, 2010). Salah satu dampak dari penerapan politik dinasti adalah rendahnya kualitas calon kepala daerah yang kemudian akan mempengaruhi kualitas pengelolaan dana publik dan pembangunan ekonomi yang akhirnya dapat mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Sehingga, daerah yang terindikasi politik dinasti cenderung memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang lebih rendah (Fontanella dan Rossieta, 2014).

Fontanella dan Rossieta (2014) menemukan adanya pengaruh kinerja pemerintah daerah terkait dengan politik dinasti. Pelaporan kinerja melalui laporan keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah daerah. Kondisi ini menjadikan

dorongan bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kualitas kinerja dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang akhirnya kinerja pemerintah daerah akan baik. Adanya kontrol pengawasan dan penilaian dari masyarakat menjadikan tekanan bagi pemerintah daerah dalam bekerja sehingga akan memperlihatkan kinerjanya dengan bekerja sebaik-baiknya sehingga secara langsung akan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan (Mahmudi, 2007). Berdasarkan uraian yang telah disebutkan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₈ : Kinerja memperlemah hubungan politik dinasti dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian dan Jenis Data

Objek pada penelitian ini adalah data realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2013-2015 yang tersedia pada *website* Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Data daerah terindikasi politik dinasti didapatkan dari data hubungan kekeluargaan dalam jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di media massa dan dirangkum secara manual oleh peneliti. Data desentralisasi fiskal bersumber dari data ringkasan anggaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Penelitian ini juga menggunakan data opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang bersumber dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan dan diunduh dari *website* BPK RI (www.bpk.go.id). Data mengenai jumlah pelanggaran SPI diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperoleh langsung dari BPK RI. Selain itu, penelitian ini menggunakan data Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Teknik Pengambilan Sampel

Pola pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *purposive sampling*. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia selama periode tahun 2013 - 2015. Populasi dapat dijadikan sebagai sampel ketika

memenuhi kriteria- kriteria berikut ini, (1) sampel merupakan pemerintah daerah yang terindikasi politik dinasti berdasarkan data Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri 2013-2015; (2) pemerintah yang laporan anggarannya tersedia di *website* Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2013-2015; (3) pemerintah daerah yang laporan keuangannya telah diaudit oleh BPK tahun 2013-2015; (4) pemerintah daerah yang masuk dalam data Keputusan Kemendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2013-2015; (5) sampel pembanding merupakan pemerintah daerah yang tidak terindikasi politik dinasti dan berada dalam satu wilayah dengan daerah yang terindikasi politik dinasti serta memenuhi kriteria 1, 2, 3, dan 4. Dengan pembanding yang digunakan adalah 1:1, yaitu jumlah sampel pembanding sama dengan jumlah sampel kasus.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan setiap kegiatan atau aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan opini audit yang dikeluarkan oleh BPK (Fontanella dan Rossieta, 2014). Opini audit dalam penelitian ini diukur dengan skala ordinal yaitu, 1= Tidak Menyatakan Pendapat; 2= Tidak Wajar; 3= Wajar Dengan Pengecualian; 4= Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan; 5= Wajar Tanpa Pengecualian.

Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah adalah suatu kondisi dimana daerah mampu secara mandiri membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik kepada masyarakat sebagai pihak yang telah membayar pajak serta retribusi yang menjadi sumber keuangan daerah (Halim dan Kusufi, 2012). Dalam penelitian ini, variabel kemandirian daerah diukur menggunakan rasio kemandirian daerah, dengan rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mudhofar dan Tahar, (2016), tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat diukur dengan penjumlahan Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Alokasi Khusus (DAK) dibandingkan dengan total pendapatan.

Efektivitas Keuangan

Efektivitas keuangan daerah otonom merupakan kemampuan daerah tersebut dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang dianggarkan, yang diukur menggunakan rasio efektivitas keuangan daerah (Dwirandra, 2008). Rasio efektivitas diperoleh melalui rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Telah Ditetapkan}}$$

Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 mengategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas yaitu sangat efektif >100; efektif > 90-100; cukup efektif > 80-90; kurang efektif > 60-80; tidak efektif ≤ 60.

Politik Dinasti

Politik dinasti adalah sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Variabel ini diukur menggunakan variabel *dummy* (Nuritomo dan Rossieta, 2014). Skor “1” untuk daerah yang terindikasi menjalankan politik dinasti pada kepala daerah dan wakil kepala daerah serta “0” untuk daerah yang tidak terindikasi menjalankan praktik politik dinasti. Data masa jabatan dan informasi status hubungan kepemimpinan kepala daerah diperoleh dari laporan yang diterbitkan Kemendagri tahun 2015.

Jumlah Pelanggaran Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh BPK, kelemahan pada sistem pengendalian internal atas laporan keuangan daerah dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD dan kelemahan struktur pengendalian internal. Berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh BPK, banyaknya jumlah kelemahan sistem pengendalian internal dapat dilihat dari temuan/kasus yang terjadi terkait sistem pengendalian internal

yang dikeluarkan oleh BPK. SPI diukur dengan menggunakan jumlah kasus kelemahan SPI tiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang terdapat pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Kinerja

Kinerja merupakan sebuah capaian organisasi dalam menjalankan seluruh tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja pemerintah merupakan capaian/prestasi yang diperoleh dari menjalankan tugas pelayanan dan mencapai tujuan organisasi. Ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Unit analisis pada penelitian ini berdasarkan periodisasi tahun kepemimpinan kepala daerah. Dalam rentang nilai 0-4, skor kinerja dikelompokkan dengan kategori skor 0 – 1 = rendah, skor 1 – 2 = sedang, skor 2 – 3 = tinggi, skor 3 – 4 = sangat tinggi.

Gambaran Umum Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pemerintah daerah yang kepemimpinannya menjalankan praktik politik dinasti pada tahun 2013-2015. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Dari populasi tersebut, selanjutnya sampel ditentukan menggunakan *purposive sampling*. Sampel penelitian terdiri dari 95 sampel utama yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang terindikasi menjalankan praktik politik dinasti tahun 2013-2015, dan 95 sampel pembanding yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang tidak terindikasi menjalankan praktik politik dinasti tahun 2013-2015. Berikut perincian proses pengambilan sampel penelitian yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Ringkasan Pengambilan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Kabupaten/Kota yang terindikasi menjalankan politik dinasti TA 2013-2015.	99
Kabupaten/ Kota yang skor kinerjanya tidak dimuat dalam <i>website</i> Kementerian Dalam Negeri.	(4)
Jumlah Sampel Terpilih	95
Kabupaten/Kota yang menjadi sampel pembanding (<i>matched sampling</i>).	95
Jumlah Sampel Terpilih dan Diolah	190

Sumber: Hasil Olah Data 2019

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 2 menunjukkan terdapat 190 sampel yang digunakan dalam penelitian. Rata-rata akuntabilitas keuangan pemerintah daerah adalah 4,13. Hal ini menunjukkan tingkat perolehan opini audit yang baik karena didominasi oleh opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas). Standar deviasi akuntabilitas keuangan pemerintah daerah sebesar 0,984. Dengan 5 sebagai nilai tertinggi dan 1 sebagai nilai terendah.

Rata-rata kemandirian daerah adalah 0,127 atau sebesar 12% dan standar deviasi 0,102. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan jumlah PAD dalam total pendapatan suatu pemerintah daerah masih tergolong kecil sehingga dapat dikatakan bahwa kemandirian daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2013-2015 masih rendah. Daerah yang memiliki kemandirian daerah paling rendah adalah Kota Pagar Alam tahun 2014 dengan rasio kemandirian daerah sebesar 0,017, dan daerah yang memiliki kemandirian daerah paling tinggi adalah Kota Bima tahun 2014 dengan rasio kemandirian daerah sebesar 0,561.

Variabel ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki nilai rata-rata 0,584 atau sebesar 58% dan standar deviasi 0,163. Nilai rata-rata 58% menunjukkan jumlah DAU dan DAK dalam total pendapatan suatu pemerintah daerah tergolong tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat masih tinggi. Daerah yang memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat paling rendah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 dengan rasio ketergantungan pada pemerintah pusat sebesar

0,0000 dan daerah yang memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat paling tinggi adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2013 dengan rasio ketergantungan pada pemerintah pusat sebesar 0,875.

Variabel efektivitas keuangan memiliki rata-rata 1,467 atau 146% dan standar deviasi 2,416. Rata-rata rasio efektivitas keuangan sebesar 146% menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah tergolong sangat efektif ($> 100\%$). Daerah yang memiliki efektivitas keuangan paling rendah adalah Kota Pagar Alam tahun 2014 dengan rasio efektivitas sebesar 0,407 dan daerah yang memiliki efektivitas keuangan paling tinggi adalah Kota Bima tahun 2014 dengan rasio efektivitas sebesar 33,686.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>
AK	190	1	5	4,130	0,984
KD	190	0,017	0,561	0,127	0,102
KPP	190	0,000	0,875	0,584	0,163
EK	190	0,407	33,686	1,467	2,416
PD	190	0	1	0,500	0,501
SPI	190	2	20	7,830	3,336
KNJ	190	0,962	3,455	2,823	0,478

Sumber: Output SPSS v.26.0.

Variabel politik dinasti yang diproksikan dengan variabel *dummy* memiliki nilai minimum 0 untuk daerah yang tidak terindikasi politik dinasti dan nilai maksimum 1 untuk daerah yang terindikasi politik dinasti. Variabel politik dinasti memiliki rata-rata 0,50 dan standar deviasi sebesar 0,501. Variabel jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal memiliki rata-rata 7,83 dan nilai standar deviasi sebesar 3,361. Jumlah temuan pelanggaran sistem pengendalian internal terendah adalah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pacitan tahun 2013 dengan jumlah 2 temuan dan jumlah temuan pelanggaran sistem pengendalian internal terbesar adalah Kota Manado tahun 2013 dengan jumlah 20 temuan.

Variabel kinerja memiliki rata-rata sebesar 2,823496 dan standar deviasi sebesar 0,4782933. Rata-rata skor kinerja 2,823496 mengindikasikan kinerja pemerintah daerah yang sudah bagus karena masuk dalam kategori tinggi (skor 2–3). Pemerintah daerah yang memiliki skor kinerja terendah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2013

dengan skor kinerja 0,9628 dan pemerintah daerah yang memiliki skor kinerja tertinggi adalah Kabupaten Pinrang tahun 2015 dengan skor kinerja 3,4552.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas pada penelitian ini dengan menggunakan *one-sample kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai sig 0,183 dan 0,318. Uji autokorelasi menggunakan *durbin-watson* menunjukkan nilai sebesar 1,734 dan 1,617. Selanjutnya, uji multikolinearitas seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan *spearman's rho* menunjukkan nilai sig semua variabel > 0,05. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik tersebut dapat disimpulkan bahwa model persamaan 1 dan 2 pada penelitian ini berdistribusi secara normal dan terbebas dari gejala autokorelasi, multikolinearitas, serta heteroskedastisitas.

Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian H_1 pada tabel 3 diketahui nilai sig 0,462 > 0,05 dengan nilai koefisien 0,577. Hasil ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah daerah belum bisa memaksimalkan potensi daerahnya yang menyebabkan daerah memiliki nilai kemandirian yang rendah.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan desentralisasi secara baik adalah daerah memiliki kemampuan dan kewenangan dalam menggali sumber keuangan, mengelola, dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya serta mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Halim, 2001). Kemandirian daerah yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah memperoleh akuntabilitas keuangan yang baik melalui opini audit yang baik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, kemandirian daerah di Indonesia pada tahun 2013-2015 memiliki rata-rata yang relatif rendah yaitu 12%. Angka ini tidak sebanding dengan rata-rata ketergantungan pada pemerintah pusat di Indonesia pada tahun 2013-2015 yaitu 58%. Artinya, pemerintah daerah belum bisa secara mandiri dalam membiayai proses penyelenggaraan pemerintahannya dan masih bergantung pada dana transfer dari pusat.

Kemandirian daerah yang rendah tersebut dapat terjadi karena sumber penerimaan strategis lebih banyak dikuasai oleh pusat. Akibatnya, sumber penerimaan strategis seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, serta penerimaan sumber daya alam migas menjadi sumber penerimaan pendapatan bagi pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota hanya mengelola sumber penerimaan non strategis seperti pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan.

Padahal, dalam kenyataannya, ketersediaan fasilitas, sarana, serta prasarana yang ada di daerah yang menjadi kontribusi pendapatan asli daerah dari obyek pajak daerah dan retribusi daerah masih terbatas. Hal ini menyebabkan sulitnya pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerahnya, sehingga berdampak pada rendahnya kemandirian daerah.

Purbasari dan Bawono (2017) menyatakan bahwa kurang maksimalnya pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerahnya, menyebabkan pemerintah daerah memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat, yang akhirnya mengakibatkan pemerintah daerah merasa tidak memiliki tanggung jawab dalam melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan PAD. Hal tersebut berdampak pada pemerintah daerah yang tidak mementingkan akuntabilitas pelaporan keuangan dari sisi desentralisasi fiskal.

Pengaruh Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian H_2 pada tabel 3 diketahui nilai $\text{sig } 0,046 < 0,05$ dengan nilai koefisien $-0,961$. Hasil ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena dengan adanya jaminan dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah akan bergantung pada dana transfer tersebut sehingga pemerintah daerah tidak mengoptimalkan sumber pendanaan yang bisa dihasilkan. Tingginya penerimaan dana dari pusat dapat menyebabkan rendahnya PAD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memperoleh dana pusat yang besar akan cenderung tidak mengoptimalkan perolehan pendanaan melalui PAD. Hal ini sesuai dengan data dalam penelitian ini, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata variabel ketergantungan pada pemerintah pusat

sebesar 58%. Angka tersebut dapat dikatakan tidak sebanding dengan rata-rata kemandirian daerah yang hanya sebesar 12%.

Dalam teori *stewardship* dijelaskan bahwa para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principle*, selain itu *steward* cenderung tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya tersebut. Tingginya ketergantungan pada pemerintah pusat menunjukkan bahwa pemerintah daerah selaku *steward* belum mampu mencapai sasaran organisasinya secara maksimal. Hal ini yang menyebabkan pemerintah daerah cenderung kurang dalam memberikan akuntabilitas publik. Semakin kecilnya proporsi pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, atau semakin besar PAD suatu daerah, maka hal itu akan berdampak pada kelancaran mobilisasi dari dana penyelenggaraan pemerintah daerah (Ariansyah *et al.*, 2004). Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lancar, akan mendukung untuk terciptanya akuntabilitas yang baik (Mudhofar dan Tahar, 2016).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fontanella dan Rossieta (2014) yang menemukan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Artinya, tingginya ketergantungan pada pemerintah pusat, kemungkinan kecil daerah tersebut memperoleh akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit.

Pengaruh Efektivitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian H_3 pada tabel 3 diketahui nilai $\text{sig } 0,491 > 0,05$ dengan nilai koefisien 0,19. Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dapat terjadi karena dalam proses pencapaian PAD dipengaruhi beberapa faktor, seperti kesiapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta perubahan kebijakan dan kepentingan publik. Kondisi ini sering dikaitkan dengan ketidakpastian lingkungan yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pemerintah daerah (Wijaya dan Akbar, 2013).

Selain itu, penggunaan rasio keuangan (efektivitas keuangan) pada organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah masih belum banyak dilakukan jika dibandingkan dengan organisasi sektor privat (Pramono, 2014). Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan penyajian laporan keuangan pada organisasi pemerintah daerah yang sifat

serta cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan organisasi sektor privat. Selain itu, penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada struktur APBD. Belum lazimnya penggunaan rasio keuangan dalam organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah ini menyebabkan efektivitas keuangan tidak dijadikan tolak ukur akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, efektivitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Mudhofar dan Tahar (2017) menemukan bahwa efektivitas realisasi PAD tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

<i>Model</i>	B	Sig
<i>1 (Constant)</i>	4,300	0,000
Kemandirian Daerah	0,577	0,462
Ketertanggungjawaban Pemerintah Pusat	-0,961	0,046
Efektivitas Keuangan	0,019	0,491
Politik Dinasti	-0,746	0,000
Jumlah Pelanggaran SPI	-0,045	0,027
Kinerja	0,358	0,010
<i>2 (Constant)</i>	5,293	0,000
Kemandirian Daerah	-3,367	0,432
Ketertanggungjawaban pada Pemerintah Pusat	-2,017	0,001
Efektivitas Keuangan	0,018	0,507
Politik Dinasti	-1,271	0,079
Jumlah Pelanggaran SPI	-0,042	0,040
Kinerja* Kemandirian Daerah	1,368	0,341
Kinerja* Ketertanggungjawaban Pemerintah Pusat	0,314	0,019
Kinerja* Politik Dinasti	0,207	0,412

Sumber: Output SPSS v.26.0.

Pengaruh Politik Dinasti terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian H_4 pada tabel 3 diketahui nilai sig $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien $-0,746$. Hasil ini menunjukkan bahwa politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Daerah yang menjalankan praktik politik dinasti cenderung memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang rendah. Teori

pilihan publik menyatakan bahwa pejabat terpilih serta birokrat pemerintah yang mengaku mengutamakan kepentingan umum dalam proses pemungutan suara, justru sering kali menggunakan sektor publik untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka (Schneider dan Damanpour, 2002). Untuk mencapai kepentingan pribadi mereka, birokrat akan senantiasa menyusun program dengan anggaran yang tidak sesuai dan berupaya untuk terus meningkatkan kekuatan serta pengaruh mereka. Karena motivasi tersebut, pejabat pemerintahan berusaha untuk terus mempertahankan kekuasaannya salah satunya melalui politik dinasti.

Politik dinasti akan membatasi munculnya alternatif calon bagi rakyat karena politik dinasti memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menang dalam pemilihan umum. Dengan kata lain, fenomena politik dinasti akan menurunkan partisipasi rakyat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah karena rakyat dihadapkan pada pilihan figur politik yang berasal dari satu keluarga. Terbatasnya alternatif calon bagi rakyat berdampak pada kualitas calon kepala daerah yang cenderung rendah, sehingga dapat mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengelola dana publik serta akuntabilitas laporan keuangan sulit tercapai. Karena pada prinsipnya, suksesi kepemimpinan dalam praktik politik dinasti tidak berdasarkan pada profesionalitas dan kapabilitas melainkan bertumpu pada hubungan darah (Prianto, 2016). Prianto (2016) menyatakan bahwa hubungan kekuasaan keluarga akan membentuk sebuah oligarki politik dan menimbulkan rezim absolut, sehingga pengawasan terhadap penguasa sulit dilakukan. Minimnya pengawasan dan profesionalitas yang kurang memadai membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Ketika penyalahgunaan wewenang dan korupsi itu terjadi akan berdampak pada pemberian opini audit oleh BPK. Nuritomo dan Rossieta (2014), Anggraini dan Riharjo (2017) menemukan bahwa praktik politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Jumlah Pelanggaran Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian H_5 pada tabel 3 diketahui nilai $\text{sig } 0,027 < 0,05$ dengan nilai koefisien $-0,045$. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, semakin banyak jumlah pelanggaran atas sistem pengendalian internal, maka

semakin rendah akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dalam teori *stewardship* dinyatakan bahwa *steward* akan berusaha untuk memenuhi kepentingan *principle*. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemerintah daerah selaku *steward* dituntut untuk mampu memenuhi kepentingan *principle* yaitu masyarakat dan DPRD, salah satunya melalui akuntabilitas publik. Jumlah sistem pengendalian internal merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi penilaian BPK mengenai pemberian opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini BPK terhadap LKPD sendiri menunjukkan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Di mana, semakin banyak jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal yang dilakukan, maka akan semakin rendah opini yang diberikan BPK terhadap LKPD. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik mampu menjamin kualitas kinerja pemerintah daerah karena akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Selanjutnya, pengendalian internal yang layak diperlukan sebagai salah satu metode dalam mencegah terjadinya penipuan dan pelaporan keuangan yang tidak akurat. Kesalahan karena catatan yang tidak akurat atau tidak lengkap mengindikasikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah mungkin memiliki salah saji material (David, 2017). Jika sistem pengendalian internal ditingkatkan, pelanggaran atas sistem pengendalian internal akan lebih rendah dan ini akan menghasilkan opini yang baik terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbasari dan Bawono (2017), Rasmini dan Masdianti (2018) yang menemukan bahwa jumlah temuan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kinerja dalam Memoderasi Hubungan Kemandirian Daerah dengan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian H_6 pada tabel 3 diketahui nilai sig $0,341 > 0,05$ dengan nilai koefisien 1,368. Hasil ini menunjukkan pengaruh interaksi kinerja dan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah tidak terdukung. Hal ini terjadi karena dengan adanya pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengelola sumber keuangannya sendiri, justru kewenangan tersebut sering kali disalahgunakan dan

cenderung akan terjadi penyelewengan sumber pendapatan. Hal ini menyebabkan kinerja pemerintah daerah tidak dapat dicapai secara maksimal. Berdasarkan data penelitian, rata-rata kemandirian daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia masih tergolong kecil yaitu sebesar 12%. Sedangkan rata-rata skor kinerja sendiri mencapai angka 2,823496 yang mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah yang sudah bagus karena masuk dalam kategori tinggi (skor 2–3). Artinya, kinerja yang baik tidak menjamin tercapainya kemandirian daerah yang tinggi, yang pada akhirnya kinerja tidak mampu memoderasi hubungan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rendahnya kemandirian daerah disebabkan karena sumber penerimaan strategis yang dikuasai oleh pemerintah pusat. Seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, serta pendapatan sumber daya alam misalnya minyak bumi dan gas. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota hanya mengelola sumber penerimaan non strategis seperti pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. Adanya pembagian kewenangan dalam pengelolaan sumber pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat memaksimalkan potensi sumber keuangan yang ada di daerahnya, sekalipun dengan kinerja yang baik. Hasil penelitian Fontanella dan Rossietta (2014), Mudhofar dan Tahar (2017) menemukan interaksi antara kemandirian daerah dan kinerja tidak menunjukkan pengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kinerja dalam Memoderasi Hubungan Ketergantungan pada Pemerintah Pusat dengan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian H_7 pada tabel 3 diketahui nilai sig $0,019 < 0,05$ dengan nilai koefisien 0,314. Hasil ini menunjukkan pengaruh interaksi kinerja dan ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah terdukung. Dalam hal ini, kinerja pemerintah daerah mampu memperlemah pengaruh negatif ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, akuntabilitas keuangan pemerintah daerah akan tetap baik ketika pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat mampu mengoptimalkan kinerjanya. Dalam teori *stewardship*, *steward* akan berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya. Kinerja yang baik merupakan salah satu upaya yang

dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan, salah satunya adalah mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat.

Kinerja pemerintah daerah diukur melalui perspektif finansial dan non finansial. Ketika aspek finansial, misalnya dana transfer dari pemerintah pusat yang tinggi dan PAD yang rendah, masih terdapat aspek kinerja non finansial yang akan mendukung terciptanya akuntabilitas yang baik misalnya kinerja pegawai yang dihubungkan dengan prestasi kinerja dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Semakin baik kinerja pemerintah daerah, maka kemungkinan nilai akuntabilitas pelaporan keuangan dalam bentuk opini audit akan semakin baik juga (Fontanella dan Rossieta (2014). Sehingga dalam hal ini, kinerja dinilai mampu memperlemah efek negatif dari hubungan ketergantungan pada pemerintah pusat dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Fontanella dan Rossieta (2014), Mudhofar dan Tahar (2017) menemukan bahwa kinerja sebagai pemoderasi berpengaruh terhadap hubungan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kinerja dalam Memoderasi Hubungan Politik Dinasti dengan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian H_8 pada tabel 3 diketahui nilai sig $0,412 > 0,05$ dengan nilai koefisien $0,207$. Hasil ini menunjukkan pengaruh interaksi kinerja dan politik dinasti terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah tidak terdukung. Politik dinasti yang terjadi pada level eksekutif (kepala daerah) akan memunculkan risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang terjadi di daerah akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan manipulasi laporan keuangan, sehingga laporan keuangan disusun tidak berdasarkan realita yang terjadi. Jika kondisi tersebut terjadi dan ditemukan oleh BPK maka kemungkinan besar pemerintah daerah tersebut mendapat opini audit yang baik. Dalam hal ini, kinerja tidak akan berpengaruh terhadap opini yang diberikan BPK ketika laporan keuangan terbukti terjadi manipulasi dan terdapat kejanggalan dalam proses pelaporannya sebagai dampak dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Berdasarkan data penelitian, daerah yang mendapatkan skor EKPPD yang tinggi belum tentu mendapatkan opini audit yang baik dari BPK. Misalnya saja Kota Tangerang

Selatan tahun 2014 yang terindikasi politik dinasti mendapatkan skor EKPPD tinggi yaitu 2,7107 tetapi mendapatkan opini audit WDP dengan skor 3. Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2014 yang tidak terindikasi politik dinasti mendapatkan skor EKPPD rendah yaitu 1,6874 tetapi mendapatkan opini audit WTP dengan skor 5. Hal ini membuktikan bahwa, kinerja tidak mampu memoderasi hubungan politik dinasti dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5. IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, efektivitas keuangan, politik dinasti, dan jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel kinerja sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 95 pemerintah kabupaten/kota yang terindikasi politik dinasti di Indonesia tahun 2013-2015, dan 95 pemerintah kabupaten/kota yang tidak terindikasi politik dinasti di Indonesia tahun 2013-2015 sebagai sampel pembanding. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat, politik dinasti, dan jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel kemandirian daerah dan efektivitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, variabel kinerja mampu memoderasi pengaruh ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak mampu memoderasi pengaruh kemandirian daerah dan politik dinasti terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Keterbatasan penelitian ini adalah periode yang digunakan hanya 3 tahun yaitu tahun 2013-2015. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya data politik dinasti dan kinerja pemerintah daerah pada *website* Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk periode tahun 2016-2018. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan data setelah tahun 2015 agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. (2006). "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)". *Simposium Nasional Akuntansi 9* Padang, Sumatera Barat.

- Anggraini, N. R. dan Riharjo, I. B. (2017). “Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Dengan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Pemoderasi”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(6), pp. 1–23.
- Ariansyah, A. et al.,. (2014). “Tingkat Ketergantungan Fiskal dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi”. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1 (3).
- Asako, Y., T. Iida, T. Matsubayashi dan M. Ueda. (2012). “Dynastic Legislators: Theory And Evidence From Japan”, *Working Papers*, Waseda University Organization for Japan-US Studies.
- Darmawati. (2017). “Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidapatuhan Terhadap Perundangundangan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini BPK RI”. *Tesis*. Universitas Lampung.
- David, R. (2017). “Contribution of Records Management to Audit Opinions and Accountability in Government”. *South African Journal of Information Management*, 1–15.
- Dwirandra, A. A. N. . (2008). “Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002 – 2006”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), pp. 1–21.
- Elmaleh, M. S. (2006). “The Reliability and Accuracy of Financial Statements. Retrieved” from [http:// www.understand-accounting.net/TheReliability and Accuracy of financial statements.html](http://www.understand-accounting.net/TheReliability%20and%20Accuracy%20of%20financial%20statements.html)
- Erryana, V. dan Setyawan, H. (2016). “Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se- Jawa Tengah)”, *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(1), pp. 1–14.
- Fontanella, A. dan Rossieta, H. (2014). “Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”, *Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok*, pp. 1–65.
- Gujarati, Damodar N. dan Porter, Dawn C. (2012). “Dasar-dasar Ekonometrika”. Bk 1 Ed 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A (2001). “Auditing: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan”. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2014). “Politik Lokal: Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya : Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung”. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa.
- Halim, A dan Kusufi, M. S. (2012). “Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah”. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, Jogyanto. (2016). “Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman”. Ed 6. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmudi. (2007). “Manajemen Kinerja Sektor Publik”. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Manurung, D. T. H. (2012). “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota

- Palangkaraya”, *JINAH (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika)*, 2(1), pp. 1–30.
- Mardiasmo. 2002. “Akuntansi Sektor Publik”. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Marfiana, N. dan Kurniasih, L. (2013). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”, *Journal and Proceeding Universitas Jenderal Soedirman*, 3(1), pp. 1–16.
- Mendoza, R.U., Beja Jr, E.L., Venida, V.S., dan Yap, D.B. (2013). “Political Dynasties and Poverty: Resolving The „Chicken or The Egg” Question”, *Working Paper*, Asian Institute of Management.
- Moisiu, A. (2013) “Decentralization and the Increased Autonomy in Local Governments”, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, pp. 459–463.
- Mudhofar, K. dan Tahar, A. (2016). “Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 17(2), pp. 176–185.
- Munawar, Abdullah, S., dan Nadir, N. (2016). “Pengaruh Jumlah Temuan Audit Atas SPI dan Jumlah Temuan Audit Atas Kepatuhan terhadap Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh”. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(2).
- Nazaruddin, I., dan Basuki, A. T. (2019). “Analisis Statistik dengan SPSS”. Ed.1. Yogyakarta: Danisa Media.
- Nuritomo dan Rossieta, H. (2014). “Politik dinasti, Akuntabilitas, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”, *Simposium Nasional Akuntansi 17*, pp. 1–37.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pramono, Joko. (2014). “Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”, *Among Makarti*, 7(13), pp. 83-112.
- Prianto, B. (2016). “Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), pp. 105–117.
- Priyatno, Duwi. (2010). “Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendaran”. Ed 1. Yogyakarta: Gava Media.
- Purbasari, H. dan Bawono, A. D. B. (2017). “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), pp. 102–108.
- Querrubin, P. (2010). “Family and Politics: Dynastic Persistence in the Philippines”, *Working Paper*, Massachusetts Institute of Technology.
- Rasmini, N. K. dan Masdiantini, P. R. (2018). “Fiscal Decentralization, Internal Control System, Accountability of Local Government and Audit Opinion”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), pp. 123–132.
- Riyadi, Slamet, dan Yulianto. (2014). “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual

- Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Akuntansi*.
- S Purnomo, B. (2017). “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), p. 276.
- Sadjiarto, A. (2000). “Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), pp. 138–150.
- Santoso, S. (2010). “Statistik Parametrik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS”. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Schneider, M. and Damanpour, F. (2002). “Public choice economics and public pension plan funding an empirical test”, *Administration and Society*, 34(1), pp. 57–86. doi: 10.1177/0095399702034001005.
- Sofyani, H., dan R. Akbar. (2013). “Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10 (2), 184-205.
- Tahar, A. dan Zakhiya, M. (2011). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), pp. 88–99.
- Wijaya, A. H. C. dan R. Akbar. (2013). “The Influence of Information, Organizational Objective and Targets, and External Pressure toward The Adoption of Performance Measurement System in Public Sector”. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 28, 62-83.
- Williams, M. (2001). “Are Intellectual Capital Performance and Disclosure Practice Related?”. *Journal of Intellectual Capital*, 2 (3), 192-203.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 2.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- <https://www.bpk.go.id/>
- <https://www.kemenkeu.go.id/>
- <https://www.kemendagri.go.id/>